

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kota Bima.

Alwi¹, M. Rimawan², Ismunandar³
¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima
Corresponding Author: Alwi, alwibima2@gmail.com

Published: January, 2026

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem pengendalian Internal Whistleblowing System, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Poulasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima, dengan Jumlah Sampel penelitian adalah 65 responden. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yakni Sistem pengendalian internal, whistleblowing system, dan Moralitas individu terhadap Pencegahan Fraud pengelolaan keuangan daerah, dengan tahapan analisis Uji kualitas data (Uji Validitas dan reabilitas) kemudian Uji Asumsi Klasik, dan di lanjutkan uji hipotesis melalui uji t dan Uji F dan Koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Sistem pengendalian Internal Whistleblowing System, dan Moralitas Individu berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keywords: Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Moralitas Individu, Fraud, Pengelolaan Keuangan Daerah

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan tugas yang krusial bagi setiap pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Bima, karena menyangkut penggunaan sumber daya publik untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan menjadi dasar tata kelola keuangan yang baik. Meskipun demikian, menurut (Taufik & Nasir, 2020) praktik pengelolaan keuangan daerah masih menunjukkan berbagai permasalahan yang relevan dengan risiko fraud atau kecurangan, yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Fenomena yang menggugah perhatian di Kota Bima adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bima Tahun Anggaran 2024. BPK mencatat adanya 20 kasus temuan dalam pengelolaan APBD Kota Bima, yang menghasilkan 57 rekomendasi perbaikan, termasuk 8 rekomendasi berdampak material dengan total nilai temuan lebih dari Rp2,3 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah dikembalikan ke kas daerah, namun masih ada temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, terkait kelebihan pembayaran honorarium pada beberapa unit kerja serta denda keterlambatan pekerjaan pendidikan yang tengah dalam proses penyelesaian hukum dan administrasi (Jendela Berita, 2025).

Walaupun Pemerintah Kota Bima tetap berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2024 — sebuah indikator bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material dan sesuai standar akuntansi pemerintahan — temuan BPK tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam praktik pengelolaan anggaran di tingkat pelaksanaan tertentu yang perlu mendapatkan perhatian serius (PROKOPIM Kota Bima, 2025).

Kondisi empiris ini menunjukkan bahwa meskipun struktur sistem pengendalian keuangan daerah telah dibangun, penerapan sistem pengendalian internal belum sepenuhnya efektif dalam mencegah, mengidentifikasi, atau menindaklanjuti kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan anggaran operasional dan belanja di beberapa unit kerja. Temuan-temuan semacam ini tidak hanya terkait dengan aspek administratif, melainkan juga berdampak pada potensi kerugian negara yang material, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengendalian internal di tingkat pelaksana anggaran.

Selain itu, temuan BPK yang berulang terkait honorarium dan pertanggungjawaban anggaran mencerminkan bahwa mekanisme *whistleblowing system* dan budaya pelaporan dugaan penyimpangan masih belum optimal. Menurut (Anlilua et al., 2023) Rendahnya pelaporan oleh pihak internal dan lambatnya tindak lanjut rekomendasi berdampak material menggambarkan potensi hambatan dalam sistem pelaporan internal yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dan perlindungan pelapor membutuhkan peningkatan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengurangi risiko fraud.

Tidak kalah pentingnya, fenomena temuan BPK juga mengindikasikan bahwa moralitas individu aparatur pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap perilaku dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam konteks kepatuhan terhadap aturan pertanggungjawaban dan etika pengelolaan anggaran. Menurut (Ilyas, 2023) Ketika moralitas individu rendah atau ada kelemahan nilai etika kerja, pegawai cenderung mengabaikan prosedur pertanggungjawaban yang benar dan membuka peluang terjadinya kesalahan atau penyimpangan.

Berdasarkan gambaran empiris yang kuat dari temuan BPK tersebut, jelas bahwa fraud dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Bima tidak hanya merupakan permasalahan administratif semata, tetapi merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara struktur sistem pengendalian internal, mekanisme pelaporan seperti *whistleblowing system*, serta moralitas individu aparatur sebagai pelaksana pengelolaan anggaran.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas individu terhadap fraud pengelolaan keuangan daerah di Kota Bima. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang tepat guna dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Internal

Menurut (Anlilua et al., 2023) Dalam Sebuah perusahaan atau organisasi, suatu Sistem Pengendalian Internal memiliki peran penting dalam manajemennya. Setiap entitas atau organisasi harus memiliki Sistem Pengendalian Internal yang efisien dan efektif dalam menerapkannya secara konsisten untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Sistem pengendalian internal adalah serangkaian langkah yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terhadap keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. (Ade Pipit Fatmawati, 2024) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah serangkaian proses yang dilakukan, yang terdiri dari serangkaian kebijakan dan prosedur yang terstruktur, dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi keandalan pelaporan keuangan perusahaan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, serta mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku.

Menurut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat diartikan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu sistem atau prosedur dan serangkaian kegiatan didalam sebuah organisasi untuk menjaga organisasi dan menjamin bahwa tujuan dan pelaksanaan kegiatan organisasi dapat tercapai dan berjalan sesuai dengan tujuan. Penyalahgunaan dan kecurangan akan dapat dihindari atau diminimalisir dengan efektif melalui penerapan sistem pengendalian internal yang baik dalam perusahaan atau organisasi.

Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk manajemen yang bertanggung jawab dan karyawan yang menjalankan prosedur-prosedur

tersebut. Selain itu, faktor penting lainnya adalah keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dalam organisasi tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh (Ni Kadek Indah Yunia Sari, 2023)

Whistleblowing System

Definisi whistleblowing adalah tindakan mengungkapkan tindakan pelanggaran hukum, korupsi, atau perbuatan lain yang berpotensi merugikan perusahaan dan pihak-pihak yang terkait. Informasi ini bisa disampaikan oleh individu atau badan hukum yang berada di dalam organisasi atau di luar organisasi kepada pimpinan perusahaan agar tindakan dapat diambil terhadap pelanggaran yang dilaporkan (Silvia, 2023).

Menurut (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008), whistleblowing dapat didefinisikan sebagai tindakan mengungkapkan tindakan yang melibatkan pelanggaran hukum, perilaku tidak etis, atau tindakan lain yang berpotensi merugikan organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pegawai atau pimpinan organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap dugaan pelanggaran dapat mengungkapkan informasi tersebut kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain. Whistleblowing yang efektif akan memotivasi baik masyarakat umum maupun karyawan dalam suatu organisasi untuk lebih berani dalam pencegahan terhadap fraud dengan cara melaporkannya kepada pimpinan organisasi atau pihak yang berwenang untuk menangani pelanggaran atau kecurangan yang terjadi.

Menurut (Murtiningrum, 2023) whistleblowing dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Whistleblowing Internal adalah ketika seorang individu yang bekerja di suatu organisasi mengetahui adanya tindakan kecurangan di lingkungan kerja mereka, dan selanjutnya, mereka memutuskan untuk melaporkan temuan tersebut kepada atasan atau pimpinan di organisasi tersebut.
2. Whistleblowing Eksternal adalah ketika seorang anggota organisasi menemukan adanya tindakan fraud yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri, dan kemudian mereka memutuskan untuk mengungkapkannya kepada publik atau lembaga eksternal lainnya karena mereka percaya bahwa kecurangan tersebut dapat berdampak merugikan bagi masyarakat umum atau pemangku kepentingan lainnya.

Moralitas Individu

Teori perkembangan moral pertama kali dikemukakan oleh Kohlberg (1969) dan telah banyak digunakan dalam memahami alasan yang dibuat seseorang saat membuat pertimbangan moral. Hal penting lain dari teori perkembangan moral Kohlberg adalah orientasinya untuk mengungkapkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan yang dibedakan dengan tingkah laku moral dalam arti perbuatan yang nyata. Semakin tinggi tahap perkembangan moral seseorang, semakin terlihat moralitas yang lebih mantap dan bertanggungjawab dari perbuatan-perbuatannya. Selanjutnya Kohlberg mengkategorikan dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam tiga tingkatan yaitu Prakonvensional Moralitas, Konvensional dan Pasca-Konvensional. (Romadaniati, 2020)

Fraud

Menurut (Cancera, 2025) definisi fraud adalah penyalahgunaan wewenang/pangkat yang terjadi dalam sektor pemerintahan yang dilakukan demi memperoleh keuntungan individu. Contohnya penjualan aset negara secara tidak sah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, pengadaan kadbaks dalam sektor pemerintahan, penyuapan, dan “pencurian” dana-dana pemerintah. Menurut (Albrecht dan Zimbelman, 2017) fraud merupakan segala upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan keahlian khusus demi memperoleh manfaat dari kelompok tertentu dengan menjalankan tindakan yang salah. (Islamiyah, 2020) berpendapat bahwa fraud merupakan tindakan melawan hukum (Illegal Acts) yang secara sengaja dilakukan demi tujuan yang dikehendaki,

contohnya melakukan penipuan dengan memberikan penjelasan/pemaparan yang salah (mislead) untuk keuntungan individu dan/atau komunitas dengan cara yang salah dan dapat merugikan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pencegahan fraud bisa dipengaruhi oleh, sistem pengendalian internal, whistleblowing dan moralitas individu, secara simultan atau bersama-sama. Hal ini berarti bahwa ada hubungan yang kuat antar variabel sehingga dapat bersama-sama mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengujian secara simultan atau bersama-sama ini untuk memperkuat masing-masing variabel dalam mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penjelasan tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Islamiyah, 2020) dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Anjani, 2024) yang menyatakan bahwa secara simultan sistem pengendalian internal, whistleblowing dan moralitas individu, berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan daerah.

H1 : Sistem pengendalian internal, *Whistleblowing System* dan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

(Setiawan, 2025) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan rangkaian kebijakan guna melindungi aset organisasi atau perusahaan dari tindakan kecurangan atau penyalahgunaan, jaminan kesediaan informasi akuntansi yang tepat akurat, dan memastikan jika segala peraturan hukum/undang-undang telah dijalankan dan ditaati oleh seluruh pegawai organisasi atau perusahaan.

Semakin baiknya sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi maka akan mencegah kecurangan karena tidak adanya peluang, namun begitu juga sebaliknya jika sistem pengendalian dalam suatu organisasi itu tidak bagus maka akan menjadi peluang bagi para kerah putih untuk melakukan kecurangan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Priandini, 2023), (Silvia, 2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaruh Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Whistleblowing adalah pengungkapan/pemberian informasi tentang tindakan kecurangan yang terjadi dalam organisasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berdampak pada kerugian negara atau masyarakat dengan tujuan yang baik demi kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Fajrianti et al., 2025) dan penelitian yang dilakukan oleh (Pratopo, 2023) menyatakan bahwa whistleblowing atau Sistem pelaporan pelanggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud.

H3 : Whistleblowing berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan daerah

Moralitas merupakan tindakan atau perilaku baik/buruk yang bersumber dari dalam diri manusia yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan organisasi. (Purwati, 2025) menyatakan bahwa seseorang yang menjunjung tinggi moralitas dapat menghindari terjadinya fraud karena seseorang yang mementingkan moral akan cenderung taat terhadap norma-norma yang berlaku sesuai dengan prinsip etika. Sedangkan, seseorang yang tidak menjunjung tinggi moralitas

akan mengambil keputusan atas keinginannya sendiri dan mengabaikan kewajiban dan peraturan yang seharusnya dipenuhi. Dengan menanamkan moralitas kepada setiap individu, diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan (fraud). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ilyas, 2023) serta (Purwati, 2025) bahwa moralitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud Tetapi hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade (2017) yang menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

H4 : Moralitas Individu berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima, Jenis Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Moralitas Individu terhadap Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kota Bima. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan tehnik purposive sampling serta Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yang diperoleh melalui pembagian kuesioner kepada responden di ukur dengan skala likert 1-5, dan nantinya data akan di analisis menggunakan Aplikasi SPSS versi 27. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai BPKAD Kota Bima, dengan Jumlah Sampel penelitian adalah 65 responden. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yakni Sistem pengendalian internal, whistleblowing system, dan Moralitas individu terhadap Pencegahan Fraud pengelolaan keuangan daerah, dengan tahapan analisis Uji kualitas data (Uji Validitas dan reabilitas) kemudian Uji Asumsi Klasik, dan di lanjutkan uji hipotesis melalui uji t dan Uji F dan Koefisien determinasi (R^2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Instrumen Data

Uji Validitas

Tabel.1

Variabel	Indikator	Nilai Sig	Nilai Dasar	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	X1	0,000	0,05	Valid
Whistleblowing System	X2	0,000	0,05	Valid
Moralitas Individu	X3	0,000	0,05	Valid
Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Daerah	Y	0,000	0,05	Valid

Sumber : Data Primer diolah SPSS27,2025

Berdasarkan pada data yang disajikan pada tabel.1 di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) dengan Nilai Sig sebesar 0,000, kemudian variabel Whistleblowing System (X2) dengan nilai sig 0,000, dan Variabel Moralitas Individu (X3) dengan nilai Sig sebesar 0,000, serta Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dengan nilai Sig sebesar 0,000, maka dapat di simpulkan baik Variabel independen maupun variabel dependen dalam penelitian ini dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Uji Reliabilitas

Tabel.2

Variabel	Cronbach Alpha	Cronbach Alpha Dasar	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	0,906	0,70	Reliabel
Whistleblowing System	0,763	0,70	Reliabel
Moralitas Individu	0,896	0,70	Reliabel
Fraud Pengelolaan Keuangan Daerah	0,802	0,70	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah SPSS27,2025

Berdasarkan pada data yang disajikan pada tabel.2 di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) memiliki Nilai Cronbach Alpha sebesar 0,906, kemudian variabel Whistleblowing System (X2) dengan nilai Cronbach Alpha 0,763, dan Variabel Moralitas Individu (X3) dengan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,896, serta Fraud Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dengan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,802, maka dapat disimpulkan baik Variabel independen maupun variabel dependen dalam penelitian ini dinyatakan Reliabel karena memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70.

Uji Asumsi Klasik

Tabel.3

Keterangan	Unstandardized	Keterangan
Asymp. Sig (2-tailed)	0,186	Normal

Sumber : Data Primer diolah SPSS27,2025

Berdasarkan data yang di sajikan pada tabel.3 di atas dapat diketahui untuk nilai Asymp. Sig (2-tailed) normalitas adalah sebesar 0,186 lebih besar dari 0,005 maka dapat disimpulkan data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan Uji normalitas data terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel.4

Variabel	Nilai Signifikan	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal (X1)	0,764	Tidak Terjadi gejala Heteroskedastisitas
Whistleblowing System (X2)	0,682	Tidak Terjadi gejala Heteroskedastisitas
Moralitas Individu (X3)	0,875	Tidak Terjadi gejala Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer diolah SPSS27,2025

Berdasarkan data yang di sajikan pada tabel.4 di atas dapat dijelaskan bahwa masing-masing nilai sig pada variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) sebesar 0,76, kemudian Whistleblowing System (X2) sebesar 0,682 dan Moralitas Individu (X3) sebesar 0,875 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai sig yang lebih besar dari 0,05 dan hal ini menunjukkan tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Tabel.5

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal (X1)	0,946	1,047	Tidak Terjadi gejala Multikolinearitas
WhistleblowingSystem (X2)	0,963	1,062	Tidak Terjadi gejala Multikolinearitas
Moralitas Individu (X3)	0,826	1,263	Tidak Terjadi gejala Multikolinearitas

Sumber : Data Primer diolah SPSS27,2025

Berdasarkan data yang di sajikan pada tabel.5 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) sebesar 1,047, kemudian variabel WhistleblowingSystem (X2) sebesar 1,062, dan Moralitas Individu (X3) sebesar 1,263, apabila nilai VIF di bawah <10 maka dapat di tarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala Multikolinearitas dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel.6

Durbin watson	Hasil ($2 < DW < 4 - 2$)	Keterangan
1,798	$1,6960 < 1,798 < 2,202$	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber : Data Primer diolah SPSS27,2025

Berdasarkan data yang di sajikan pada tabel.6 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai durbin-watson adalah 1,798 maka dalam pengujian ini menggunakan rumus $dU < DW < 4 - dU$, dengan asumsi jika nilai $DW < 4 - dU$ maka diartikan terjadi autokorelasi tetapi jika nilai $DW < 4 - dU$ maka diartikan tidak terjadi autokorelasi dalam pengujian ini dari jumlah sampel ($n=65$), maka dilihat dari tabel statistik diperoleh hasil dU adalah 1,6960 serta nilai $DW=1,798$, jika masukan diasumsi uji autokorelasi maka hasil $dU < DW < 4 - dU$ ($1,6960 < 1,798 < 2,202$) maka dapat di tarik kesimpulan pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel.7

Variabel	Nilai Unstandardized Coefficients	t hitung VIF	Sig
Constanta	-19,673	-26,714	0,000
Sistem Pengendalian Internal (X1)	0,346	27,236	0,000
WhistleblowingSystem (X2)	0,529	39,128	0,000
Moralitas Individu (X3)	0,842	44,523	0,000

Sumber : Data Primer diolah SPSS27,2025

Berdasarkan data yang di sajikan pada tabel.7 di atas untuk analisis regresi linear berganda dapat di jelaskan dengan menggunakan persamaan berikut ini :

$$Y = -19,673 + 0,346X_1 + 0,529X_2 + 0,842X_3 + e$$

Berdasarkan Persamaan regresi linear berganda di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Nilai Constanta adalah sebesar -19,673 artinya jika di asumsikan nilai variabel independen bernilai nol, maka nilai variabel dependen atau terikat adalah sebesar -19,673 dalam penelitian ini, jika Pengaruh Sistem Pengendalian internal, Whistleblowing System, dan Moralitas Individu bernilai nol (0), maka variabel dependen yakni Pencegahan Fraud pengelolaan keuangan daerah bernilai -19,673.
2. Nilai Koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian internal (X_1) mengarah positif, artinya jika terjadi kenaikan Sistem pengendalian Internal meningkat (X_1) mengalami peningkatan sebesar 0,346 maka variabel Pencegahan Fraud pengelolaan keuangan daerah (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,346.
3. Nilai Koefisien regresi variabel Whistleblowing System (X_2) mengarah positif, artinya jika terjadi kenaikan Whistleblowing System (X_2) mengalami peningkatan sebesar 0,529 maka variabel Pencegahan Fraud pengelolaan keuangan daerah (Y) mengalami peningkatan sebesar 0, 529.
4. Nilai Koefisien regresi variabel Moralitas Individu (X_3) mengarah positif, artinya jika terjadi kenaikan Moralitas Individu (X_3) mengalami peningkatan sebesar 0,842 maka variabel Pencegahan Fraud pengelolaan keuangan daerah (Y) mengalami peningkatan sebesar 0, 842.

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Tabel.8

Uji t (Parsial)

Variabel	P value	t hitung	Sig	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal (X_1)	$P < 0,05$	27,723	0,000	H_1 Diterima
Whistleblowing System (X_2)	$P < 0,05$	36,006	0,000	H_2 Diterima
Moralitas Individu (X_3)	$P < 0,05$	44,463	0,000	H_3 Diterima

Sumber : Data Primer diolah SPSS27,2025

Dari perhitungan uji t menunjukkan bahwa :

1. Hasil uji t memperlihatkan nilai sig variabel Sistem Pengendalian Internal (X_1) $0,000 < 0,05$. dengan begitu dapat dilakukan penarikan simpulan bahwa hipotesis yang memberikan “Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan daerah Di Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pemerintahan Kota Bima” H_1 (diterima).
2. Hasil uji t menunjukkan nilai sig Whistleblowing System (X_2) $0,000 < 0,05$. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan “Whistleblowing System secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah Di Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pemerintahan Kota Bima” H_2 (diterima).
3. Hasil uji t pengujian memperlihatkan nilai sig pada Moralitas Individu (X_3) $0,000 < 0,05$. atas dasar hal tersebut dapat dilakukan penarikan simpulan bahwa hipotesis yang menyatakan “moralitas sensitivity secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah Di Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pemerintahan Kota Bima” H_3 (diterima).

Uji f (Simultan)

Tabel.9

Variabel	P value	t hitung	Sig	Keterangan
X ₁ X ₂ dan X ₃ terhadap Y	P <0,05	1283,892	0,000	H4 Diterima

Sumber : Data Primer didah SPSS27,2025

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel.9 hasil uji f (simultan) maka dapat dijelaskan, dengan jumlah n=65, nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa variabel varian Sistem Pengendalian Internal (X₁), Whistleblowing System (X₂), dan Moralitas Individu (X₃) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan Daerah (Y). dan hipotesis yang menyatakan Bahwa Sistem pengendalian internal, Whistleblowing System dan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah H₁ (diterima).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel.10

Uji Koefisien Determinasi

Keterangan	Adjusted R square	Kesimpulan
X ₁ , X ₂ dan X ₃ terhadap Y	0,994	0,994 x 100%

Sumber : Data Primer didah SPSS27,2025

Berdasarkan data pada Tabel 10, nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan (adjusted R²) sebesar 0,994 atau 99,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X1), Whistleblowing System (X2), dan Moralitas Individu (X3) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi Pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 99,4%. Sisanya sebesar 0,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa Sistem pengendalian internal memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan secara efektif mampu menciptakan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Keberadaan struktur organisasi yang jelas, pemisahan fungsi yang tegas, serta prosedur otorisasi dan dokumentasi yang memadai menjadi faktor penting dalam menutup celah terjadinya kecurangan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai alat preventif yang mampu mendeteksi kesalahan maupun penyimpangan sejak dini. Ketika pengendalian internal berjalan secara konsisten dan didukung oleh komitmen pimpinan, aparatur pengelola keuangan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karena adanya risiko terdeteksinya tindakan fraud. Dengan demikian, semakin baik kualitas sistem pengendalian internal yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khoerunnisa, 2023) serta penelitian (Nur'aini, 2024) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, diharapkan pemerintah kota bima dapat terus memperkuat desain dan implementasi Sistem Pengendalian Internal sebagai strategi utama pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkup pemerintahan Kota Bima.

Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa *Whistleblowing System* merupakan mekanisme pelaporan yang memberikan ruang bagi individu untuk melaporkan dugaan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan organisasi. Keberadaan sistem ini menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan fraud karena mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aparatur yang mengetahui adanya indikasi fraud memiliki saluran resmi untuk menyampaikan informasi tersebut tanpa harus khawatir terhadap risiko pembalasan.

Efektivitas *Whistleblowing System* sangat bergantung pada tingkat kepercayaan pegawai terhadap sistem tersebut, termasuk jaminan kerahasiaan identitas dan perlindungan hukum bagi pelapor. Ketika sistem pelaporan berjalan dengan baik dan dipercaya, potensi terjadinya fraud dapat ditekan karena pelaku akan merasa diawasi tidak hanya oleh sistem formal, tetapi juga oleh rekan kerja di lingkungan organisasi. Oleh karena itu, implementasi *Whistleblowing System* yang efektif berkontribusi secara signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam perspektif teori *Fraud Triangle*, *whistleblowing system* menekan unsur *opportunity* dan *rationalization*. Pelaku kehilangan ruang untuk menyembunyikan tindakan karena rekan kerja dapat melaporkan pelanggaran. Pada saat yang sama, budaya pelaporan yang kuat melemahkan pembenaran atas perilaku tidak etis, dan menindaklanjuti setiap laporan secara konsisten agar *whistleblowing system* berfungsi optimal dalam mencegah fraud pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Romadaniati, 2020) dan (Khoerunnisa, 2023) bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan Fraud Pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Moralitas Individu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa faktor internal pegawai memegang peran penting dalam menentukan perilaku etis dalam pengelolaan keuangan publik, Moralitas individu membentuk cara pegawai menilai benar dan salah. Pegawai dengan tingkat moralitas yang tinggi cenderung menolak tindakan yang melanggar aturan meskipun terdapat tekanan atau peluang untuk berbuat curang. Sikap ini secara langsung menekan unsur *rationalization* dalam teori *Fraud Triangle*.

Moralitas yang kuat juga meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntabilitas. Pegawai yang menjunjung nilai etika akan menjalankan tugas sesuai prosedur dan menghindari manipulasi laporan keuangan. Kesadaran moral mendorong tanggung jawab terhadap penggunaan dana publik dan kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anjani, 2024) dan (Ilyas, 2023) yang menyatakan bahwa Moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah perlu memperkuat Moralitas Individu melalui pendidikan etika, keteladanan pimpinan, dan budaya organisasi yang menjunjung integritas sebagai upaya berkelanjutan dalam mencegah fraud pengelolaan keuangan daerah.

KE SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan atas hasil analisis Penelitian adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Signifikan secara parsial terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Sistem Whistleblowing System Berpengaruh Signifikan secara parsial terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Sistem Moralitas Individu Berpengaruh Signifikan secara parsial terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Moralitas Individu Berpengaruh Signifikan secara Simultan terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Adapun saran yang peneliti dapat berikan adalah sebagai berikut :

1. Mengingat Sampel penelitian hanya di Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah di harapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian mencakup seluruh Aparatur pegawai pemerintah Kota Bima.
2. Disarankan dapat menambah variabel penelitian lainnya, yang belum sempat di teliti pada penelitian ini seperti Akuntabilitas, karena akuntabilitas juga sering kali menjadi faktor penting dalam banyak konteks, seperti kinerja organisasi, transparansi, dan kepercayaan publik. Menambahkan variabel ini dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian yang lebih relevan dan mendalam terkait pengaruh akuntabilitas terhadap hasil yang diteliti.
3. Diharapkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dapat memperkuat penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten pada seluruh proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Whistleblowing system perlu dioptimalkan agar mudah diakses, menjamin kerahasiaan pelapor, dan ditindaklanjuti secara tegas. BPKAD juga perlu meningkatkan moralitas individu melalui pembinaan etika, penguatan integritas, dan penegakan sanksi yang adil. Langkah ini dapat meningkatkan pencegahan Fraud secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Pipit Fatmawati. (2024). "Analisis Penerapan Whistleblowing System Dalam Pencegahan Terhadap Kecurangan (FRAUD) Pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung". Land Journal Volume 5 Nomor 2 Juli 2024.
- Albrecht dan Zimbelman, 2017. (2017). Akuntansi Forensik (Salemba Empat, Ed.).
- Anjani. (2024). "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Sensitivity Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus desa di kecamatan cepogo kabupaten boydali)". Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, 12(1). www.fokus.jateng.com
- Anlilua, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Rusmita, S. (2023). "Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud". In Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) 2023 (Vol. 1, Issue 3).
- Cancera. (2025). "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Moralitas, Kepuasan Kerja, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud". AKUNTANSI DEWANTARA, 9(1), 137–151. <https://doi.org/10.30738/ad.v9i1.19501>
- Fajrianti, M. N., Naura Kamila, T., Mufidah, G. H., Choirunisa, S. Z., Aziza, N. N., & Khoirul Anwar, M. (2025). "Whistleblowing System (WBS) Sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah". In JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin (Vol. 04, Issue 01). JIMU.
- Ilyas. (2023). Faktor Morality Dan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pencegahan Fraud Dana Desa (Vol. 1, Issue 3).
- Islamiyah. (2020). "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan dana desa di kecamatan vajak (studi empiris pada desa Blayu dan desa Patokpids)". Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) Volume 8, No.1 Tahun 2020.
- Khoerunnisa. (2023). "Pengaruh Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi pada Aparatur Desa Di Kecamatan Karangunggal, Kabupaten Tasikmalaya)". <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). Komite Nasional Kebijakan Governance

- Murtiningrum. (2023). Volume 2 Nomor 7 Juli 2023, "Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud". <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Ni Kadek Indah Yunia Sari. (2023). 3265-ArticleText-14615-1-10-20230818.
- Nur'aini. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Whistleblowing System, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada Inspektorat Daerah Kota Bandung).
- Pratopo. (2023). "Pengaruh Sistem Pelaporan Pelanggaran Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Keurangan". *Journal Of Economic and Business UBS*, 12.
- Priandini. (2023). "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Moralitas Individu, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo". *Innovative Technologia: Methodical Research Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.47134/innovative.v2i4>
- Purwati. (2025). PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 17(1), 83–117. <https://doi.org/10.24905/permana.v17i1.339>
- Romadaniati. (2020). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi; "The Influence Of Village Apparature Competence, Internal Control System And Whistleblowing System On Fraud Prevention In Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (Study In Villages In Bengkalis District)". In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 4, Issue 3). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php>
- Setiawan. (2025). Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BOSP. <https://journal.catalystindo.org/index.php/jmei/index1> <https://journal.catalystindo.org/index.php/jmei/index>
- Silvia. (2023). Efektivitas pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Good Government Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. In *Serinar Nasional-Universitas Borneo* (Vol. 2, Issue 1).
- Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi : "The Influence Of Village Apparature Competence, Internal Control System And Whistleblowing System On Fraud Prevention In Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (Study In Villages In Bengkalis District)". In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 4, Issue 3). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php>.